



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
UNIT KERJA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS PRAMUSINTO**
2. Jabatan : **KETUA KASN**
3. NHK : **674427**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.930.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m²/100 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 394 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 319 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 430 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. Tanah Seluas 700 m² di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 292.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO VESPA SCOOTER SPRINT IGET 150 ABS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.614.974.028



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.836.974.028
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.836.974.028

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.